

## **Evaluasi Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa**

**Oleh:  
Shendi Rorong  
Lintje Kalangi**

Program Pendidikan Profesi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
Email: she\_rorong@yahoo.co.id

### **A B S T R A K**

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengevaluasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa serta memproyeksikan kontribusi penerimaan pajak daerah tahun 2014. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 35,84 % pada tahun 2009. Tahun 2010 pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 37,34%. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 42,33%. kemudian pada tahun 2012 pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan juga sebesar 46,36 %. Dan pada tahun 2013 pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan yaitu sebesar 37,24%. Dan berdasarkan data historis, proyeksi penerimaan kontribusi pajak daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2014 sebesar Rp.951.133.366,05.

***Kata kunci : Pajak Daerah , Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Pajak***

### ***ABSTRACT***

*The purpose of this study was to evaluate the local tax revenue to local revenues and to determine the contribution of local taxes to local revenues as well as projecting the contribution of Minahasa District local tax revenue in 2014. Results of this research that indicates that the local tax contribution to local revenues by 35, 84% in 2009. year 2010 local taxes to local revenues amounted to 37.34%. In the year 2011 increased local taxes to local revenues amounted to 42.33%. later in 2012 local taxes to local revenues also increased by 46.36%. And in 2013 the regional tax on local revenue decreased by 37.24%. And based on historical data, the contribution of local tax revenue projections Minahasa district in 2014 amounted Rp.951.133.366, 05.*

***Keyword : Local Taxes, Local Revenue, Tax Filing***

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kabupaten Minahasa sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Utara tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa sendiri. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka pemerintah Kabupaten Minahasa berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Untuk itu Penulis merumuskannya dalam skripsi dengan mengangkat judul : **“Evaluasi Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dikabupaten Minahasa”**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut : Bagaimana kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa selama periode 2009-2013?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti, Dapat mengetahui perkembangan penerimaan pajak daerah Minahasa.
2. Bagi Instansi Terkait, Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijaksanaan dalam usahanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Minahasa.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, Diharapkan sebagai bahan dan informasi bagi peneliti selanjutnya terhadap masalah dan tempat yang sama untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah Minahasa.

### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Noni Puspita Sari (2009) dengan penelitian “Pengaruh Dana Alokasi (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung Dikabupaten Provinsi Riau”. Ada tiga simpulan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: Pertama, DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Kedua, PAD secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja langsung secara parsial. Ketiga, DAU dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung. Persamaan Penelitian ini dengan yang akan diteliti adalah pada variabel yaitu pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian. Objek penelitian yang akan diteliti adalah Kabupaten Minahasa.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Akuntansi**

#### **2.1.1 Definisi**

Menurut Azhar Susanto (2008:72) sistem informasi akuntansi adalah Kumpulan (Integrasi) dari sub sub sistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.

#### **2.1.2 Manfaat Informasi Akuntansi**

Azhar Susanto (2008:2012) mengemukakan definisi sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem pengolahan data akuntansi yang terdiri dari koordinasi manusia, alat dan metode berinteraksi dalam suatu wadah organisasi yang terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen yang terstruktur.

### **2.1.3 Akuntansi Keuangan Daerah**

Darise (2008) dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Karena akuntansi keuangan daerah menghasilkan informasi bagi pihak intern maupun ekstern pemerintah daerah, sehingga dapat digolongkan sebagai akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Pertanggungjawaban (accountability and stewardship)
2. Manajerial
3. Pengawasan

## **2.2 Konsep Pajak**

### **2.2.1 Definisi**

Mardiasmo (2009), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipakasakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **2.2.2 Syarat Pemungutan Pajak**

Syarat-syarat pemungutan pajak Mardiasmo (2012:2) yaitu :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

### **2.2.3 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Menurut Erly Suandy (2008:28) terdapat lima teori pemungutan pajak yaitu :

1. Teori Asuransi  
Teori Asuransi merupakan teori pemungutan pajak dimana pembayaran pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebagai premi untuk mendapatkan perlindungan dari negara.
2. Teori Kepentingan  
Teori kepentingan merupakan teori pemungutan pajak dimana negara memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari warga negaranya berdasarkan pada kepentingan masing-masing individu.
3. Teori Gaya Pikul  
Dasar teori pemungutan pajak ini adalah asas keadilan yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama besarnya atau adil dan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan kemampuan ekonomi Wajib Pajak.
4. Teori gaya Beli  
Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat kepada negara dimaksudkan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat dalam negara yang bersangkutan.
5. Teori Bakti  
Teori Bakti ini menekankan pada negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan sebagai organisasi yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum maka rakyat harus membayar pajak kepada negara sebagai kewajiban dan tanda bakti kepada negara.

### **2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009:7) tata cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut : 1. Stelsel Pajak

2. Asas Pemungutan Pajak.
3. Sistem Pemungutan Pajak

### **2.2.5 Cara Perhitungan Pajak**

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat.

Pajak terutang = Tarif pajak x dasar pengenaan pajak

### **2.3 Pajak Daerah**

Undang-undang nomor 34 tahun 2000 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini berarti untuk dapat ditetapkan dan dipungut pada suatu daerah provinsi, kabupaten, atau kota harus terlebih dahulu ditetapkan peraturan daerah tentang pajak daerah tersebut. Peraturan daerah tentang suatu pajak daerah diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah tentang suatu pajak daerah tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **2.3.1 Retribusi Daerah**

Jenis-jenis retribusi daerah menurut UU no 34 tahun 2000 dengan PP no 66 tahun 2001

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

#### **2.3.2 Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak.
2. Ditetapkan oleh kepala daerah.
3. Dipungut oleh pemungut pajak.

#### **2.3.3 Dasar Pengenaan Pajak Dan Cara Perhitungan Pajak Daerah**

Undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

1. Bendaharawan Sebagai Pemungut Pajak
2. Penghasilan Yang Dikenakan PPh menurut UU no 36 Pasal 22
3. Pemungutan Dan Penyetoran PPh Pasal 22

#### **2.3.4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah**

Sesuai dengan pasal 76 PP nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, dalam rangka pemungutan pajak daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5%. Pedoman tentang alokasi biaya pemungutan ditetapkan oleh menteri dalam negeri dengan pertimbangan menteri keuangan. Sehubungan dengan ketentuan ini, menteri dalam negeri mengeluarkan keputusan menteri dalam negeri nomor 35 tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002 tentang pedoman alokasi biaya pemungutan pajak daerah.

### **2.4 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut undang-undang no 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah: "Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi".

## **III. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Data dan Sumber Data**

#### **3.1.1 Jenis Data**

Menurut Sugiyono (2012:7) metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.

Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan

Dalam penelitian ini digunakan dalam data kuantitatif yaitu jumlah penerimaan pajak daerah kabupaten minahasa tahun 2009-2013 yang di analisis dan dideskripsikan.

### 3.1.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Data Primer

Suharsimi Arikunto (2010:172) data primer adalah Merupakan data yang langsung dapat dan disajikan sebagai sumber dari penelitian dan pengamatan secara langsung pada objek atau perusahaan tempat penulis melakukan penelitian, dimana dilakukan dengan cara penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang langsung dengan penelitian yang dilakukan

#### 2. Data Sekunder

Suharsimi Arikunto (2010:172) Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumberlain yang dikategorikan sebagai data sekunder misalkan melalui catatan atau arsip perusahaan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain.

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data yang untuk penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (field research),
2. .Penelitian Perpustakaan (library research)

### 3.3 Metode Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan analisis sebagai berikut :

#### 1. Analisis komparatif

Analisis Komparatif yang membandingkan antara pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Minahasa kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2009 – 2013 dengan rumus sebagai berikut

$$\text{Rasio Penerimaan pajak daerah terhadap PAD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan daerah}} \times 100 \%$$

#### 2. Analisis Data Historis yang bersifat efektif dan efisien

Langkah–langkah yang digunakan dalam analisis data historis dengan cara:

- a. Mencari realisasi/penerimaan pajak daerah 4 tahun terakhir.
- b. Menghitung kenaikan realisasi tiap tahun.

$$\text{TK} = \frac{(N_{(t)} - N_{(t-1)})}{N_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

TK = Penerimaan pajak daerah Tahun yang bersangkutan

$N_{(t)}$  = Data realisasi/ penerimaan pajak bahan daerah tahun bersangkutan.

$N_{(t-1)}$  = Data realisasi/penerimaan pajak daerah satu tahun sebelumnya.

- c. Menghitung rata–rata tingkat kenaikan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Minahasa.

$$x\text{TK} = \frac{\text{TK}}{N}$$

Keterangan:

xTK = Rata – rata tingkat kenaikan realisasi

- TK = Jumlah kenaikan realisasi  
 N = Jumlah tahun
- d. Menghitung Tingkat Kenaikan Riil (TKR) yaitu terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Minahasa  
 TKR = Rata-rata tingkat kenaikan realisasi – rata-rata tingkat kenaikan tarif.  
 TKR = Kemampuan Kabupaten Minahasa dalam merealisasikan target yang sudah ditetapkan.
- e. Menghitung Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah 4 Tahun Dengan Menggunakan Cara :  
 $Pr_{(t)} = \{(TKR + \text{Kenaikan Tarif}) + 100\% \} \times N_{(t-1)}$   
 Keterangan :  
 $Pr_{(t)}$  = Proyeksi penerimaan pajak daerah pada tahun bersangkutan.  
 $N_{(t-1)}$  = Penerimaan atau realisasi pajak daerah satu tahun sebelumnya.

### 3.4. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan topik penelitian ini.
2. Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada.
3. Mengolah data yang ada.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

### 3.5 Definisi Operasional

1. Pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Minahasa. Variabel ini diukur dari jumlah pendapatan asli daerah dalam satuan rupiah.
2. Pajak daerah yang dimaksud adalah merupakan penerimaan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dilakukan oleh dinas pendapatan daerah/dispenda) Kabupaten Minahasa, pajak ini dilakukan gunanya untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda) Kabupaten Minahasa no 10 tahun 2008.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Deskripsi Objek Penelitian

#### 4.1.1 Sejarah Kabupaten Minahasa

Minahasa berasal dari kata Minaesa yang berarti persatuan, yang mana zaman dahulu Minahasa dikenal dengan nama malesung. Menurut penyelidikan dari Wilken dan Graafland bahwa pemukiman nenek moyang orang Minahasa dahulunya di sekitar pegunungan wulur mahatus, kemudian berkembang dan berpindah ke mieusstakan (daerah sekitar tompaso baru saat ini). Orang minahasa yang dikenal dengan keturunan Toar Lumimuut pada waktu itu dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Makarua Siow : Para Pengatur Ibadah Dan Adat
2. Makatelu Pitu : Yang Mengatur Pemerintahan
3. Pasiowan Telu : Rakyat

#### 4.1.3 Letak Geografis Kabupaten Minahasa

Kabupaten Minahasa Terletak Di Antara:

01°01'00"- 01°29'00" Lintang utara

124°34'00"- 125°05'00" Bujur timur

Kabupaten Minahasa Berbatasan Dengan:

1. Sebelah Utara : Minahasa Utara
2. Sebelah Timur : Kota Bitung Dan Laut Maluku

3. Sebelah Selatan : Kabupaten Minahasa Selatan
4. Sebelah Barat : Kota Manado Dan Laut Sulawesi

#### 4.2 Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan Asset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa

Visi : Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah untuk meningkatkan penerimaan dan pelayanan optimal.

- Misi :
- a. Meningkatkan sumber-sumber potensi penerimaan pendapatan daerah.
  - b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
  - c. Mengembangkan koordinasi secara sinergis dalam pengelolaan pendapatan daerah.
  - d. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah.

#### 4.3 Hasil Penelitian

##### 4.3.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah kabupaten Minahasa

Kontribusi pajak daerah Kabupaten Minahasa selama 5 (tahun) terakhir dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1 Target Dan Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2009 - 2013**

No	Tahun anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2013	11.638.218.000,00	11.638.218.000,00	0.00 %
2	2012	12.223.800.000,00	10.419.017.784,00	(85 %)
3	2011	10.760.175.000,00	10.075.994.263,00	(93,64 %)
4	2010	7.356.374.887,00	9.208.217.478,00	125,17 %
5	2009	5.140.000.000	8.515.457.696	165,67 %

Sumber data : Ringkasan APBD Kab. Minahasa

##### 4.3.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa

Selama lima tahun anggaran (2009-2013) bahwa realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut :

**Tabel 4.2 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Minahasa Tahun 2009 - 2013**

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2013	28.018.938.500,00	31.256.367.000,00	3,69%
2	2012	27.007.276.500,00	22.477.366.444,00	83,23%
3	2011	24.544.538.719,00	23.809.053.306,00	(97,00%)
4	2010	18.365.384.887,00	24.660.933.541,55	134,28%
5	2009	15.575.385.000,00	23.764.290.906,93	150,64 %

Sumber data : Ringkasan APBD Kab.Minahasa

##### 4.3.3 Analisis Data dan Pembahasan

Berdasarkan data diatas maka evaluasi kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Minahasa selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

**Table 4.3 Evaluasi Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Tahun 2009 – 2013**

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2013	11.638.218.000,00	31.256.367.000,00	37,24 %

2	2012	10.419.017.784,00	22.477.366.444,00	46,36 %
3	2011	10.075.994.263,00	23.809.053.306,00	42,33 %
4	2010	9.208.217.478,00	24.660.933.541,55	37,34 %
5	2009	8.515.457.696,00	23.764.290.906,93	35,84 %

Sumber Data: Diolah (2014).

#### 4.4 Penerimaan Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Berdasarkan Analisis Data History

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah disajikan diatas untuk selanjutnya Penulis akan menyajikan hasil penerimaan kontribusi pajak daerah dengan menevaluasi data historis realisasi pajak daerah Kabupaten Minahasa. langkah-langkah yang akan dilakukan :

1. Data Realisasi/Penerimaan Kontribusi Pajak Daerah Dalam 5 Tahun Terakhir

**Tabel 4.4 Data Realisasi/Penerimaan Pajak Daerah  
Kabupaten Minahasa  
Tahun 2009 – 2013**

Tahun	Jumlah Penerimaan/realisasi	Growth/Pertumbuhan (%)
2013	11.638.218.000,00	11,71%
2012	10.419.017.784,00	3,41 %
2011	10.075.994.263,00	9,43 %
2010	9.208.217.478,00	8,14 %
2009	8.515.457.696,00	-

Sumber data: Diolah (2014)

2. Menghitung Tingkat Pertumbuhan Realisasi Tiap Tahun

$$2009/2010 = \frac{8.515.457.696,00 - 9.208.217.478,00}{9.208.217.478,00} \times 100\% = 8,14 \%$$

$$2010/2011 = \frac{10.075.994.263,00 - 9.208.217.478,00}{9.208.217.478,00} \times 100\% = 9,43 \%$$

$$2011/2012 = \frac{10.419.017.784,00 - 10.075.994.263,00}{10.075.994.263,00} \times 100\% = 3,4\%$$

$$2012/2013 = \frac{11.638.218.000,00 - 10.419.017.784,00}{10.419.017.784,00} \times 100\% = 11,71 \%$$

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa realisasi pertumbuhan penerimaan pajak daerah yaitu 8,14 % pada tahun 2010. Kemudian 9,43% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 terjadi penurunan 3,41%. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 11,71 %

## 3. Menghitung Rata – rata Tingkat Pertumbuhan Real (TKR)

$$TK = \frac{8,14 + 9,43 + 3,41 + 11,71}{4} = 8,1725 \%$$

Jadi rata-rata tingkat kenaikan Kontribusi Pajak daerah adalah sebesar 7,68%

## 4. Menghitung Tingkat Kenaikan Real (TKR)

$$32,56 \% - 0\% = 8,1725 \%$$

## 5. Menghitung proyeksi penerimaan kontribusi pajak daerah tahun 2014

$$2014 = (100\% + 8,1725\%) \times 11.638.218.000,00 = \text{Rp. } 951.133.366,05$$

Berdasarkan evaluasi/perhitungan tersebut maka dapat diketahui proyeksi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa 2014 sebesar Rp.951.133.366,05

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Minahasa dalam lima tahun terakhir ini yaitu dari tahun 2009-2013 cenderung meningkat.
2. Kontribusi penerimaan pajak daerah Kabupaten Minahasa dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2009 sampai tahun 2013 yaitu pada tahun 2009 Rp. 8.515.457.696, tahun 2010 Rp.9.208.217.478,00, tahun 2011 Rp.10.075.994.263,00, pada berikutnya mulai meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 Rp. 10.419.017.784,00 dan ditahun 2013 Rp.11.638.218.000,00
3. Pemungutan pajak daerah, wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri.
4. Kontribusi terbesar pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Minahasa yaitu pada tahun 2012 dengan persentase 46,36%
5. Berdasarkan evaluasi dan proyeksi data historis proyeksi penerimaan pajak daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2014 Rp.951.133.366,05

### 5.2. Saran

1. Lebih ditingkatkan lagi fungsi control dari pemerintah terhadap instansi terkait demi terciptanya kinerja yang lebih baik lagi sehingga untuk tahun-tahun selanjutnya dapat memberikan hasil yang lebih memuaskan.
2. Pemerintah daerah khususnya dinas pengelolaan keuangan asset dan pendapatan kabupaten minahasa harus mengikuti prosedur yang ada dan lebih tegas lagi terhadap wajib pajak melalui pemberian sanksi hukum yang tegas bagi yang melanggar
3. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak daerah harus lebih digalakkan agar terciptanya kesadaran kolektif sehingga masyarakat menjalankan kewajibannya demi meningkatkan penerimaan pajak daerah kabupaten minahasa.

## DAFTAR PUSTAKA

Susanto Azhar, 2008:72, Sistem Informasi Manajemen, Penerbit Linggar Jaya

Howood Bodnar, 2010, Sistem Informasi, Penerbit Unesco

Darise, 2008, Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Indeks, Jakarta

Harisson Hongren, 2007:4, Konsep Akuntansi, Penerbit Erlangga Jakarta

Mardiasmo, 2009:7, 2012:2, Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta

Sudirman Rismawati, 2012:9, Perpajakan, Penerbit Salemba Dua Media.

Sugiono, 2012:7, Metode Penelitian, Penerbit CV Alfabetika Bandung.